

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah (Amtiran, 2020).

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinnekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, dengan upaya tersebut diharapkan daerah lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan profesi bendahara pengeluaran SKPD, karena tugas dari seorang bendahara pengeluaran SKPD adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawab kan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD di SKPD (Danu, 2021).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris (Mohammad, 2020).

Representasi opini WTP dari BPK ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah memiliki kualitas laporan keuangan yang sangat baik dan tepat waktu menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupate Simeulue sudah baik. Perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue secara konsisten berturut-turut menjadi perhatian untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Simeulue (Deweta, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Saldrak, 2019).

Menurut Halim dan Iqbal, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan. Sedangkan menurut Sumarsono, pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja agar sesuai dengan tujuan yang hendak di capai (Enita, 2022).

Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ismiatun, 2024).

Fenomena ini juga terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2021 atas Laporan Keuangan Pemkab Simeulue, Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) mengalami kerugian kumulatif sebesar Rp 190,794 miliar. Dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Simeulue yang diterima AJNN per 31 Desember 2021, diketahui penyertaan modal Pemkab Simeulue untuk PDKS sebesar Rp 255,3 miliar. Namun perusahaan tersebut terus menerus mengalami kerugian, hingga 31 Desember 2021 kerugian kumulatif mencapai Rp 190,794 miliar. Hal ini mengakibatkan nilai ekuitas PDKS hanya tersisa Rp 64,5 miliar. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu dan Arum (GWA) diketahui kerugian PDKS pada tahun berjalan (tahun 2021) sebesar Rp 4,978 miliar, sedang kerugian tahun 2020 sebesar Rp 7,824 miliar. Atas kondisi tersebut, KAP Griselda, Wisnu dan Arum menolak menyatakan Opini (*Disclaimer*), dikarenakan perusahaan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) sehingga tidak ditemukan suatu internal control yang baik dalam mengawasi jalannya bisnis perusahaan sampai berakhirnya pemeriksaan. (<https://www.ajnn.net/>)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat serta negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewajiban seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara proporsional. Peraturan Menteri Daerah dalam Negeri/Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan baik secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Febriana, 2021)

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki (Ibnu, 1982:41). Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut: (a) Menetapkan standar atas dasar control, (b) Mengukur hasil pekerjaan secepatnya, (c) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula, (d) Mengadakan tindakan koreksi (Mohammad, 2021)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Ricky, 2021)

Hasil penelitian (Ricky, 2021) dengan judul pengaruh akuntabilitas keuangan daerah *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi kajiian pada pemerintahan kabupaten

Lab Uhanbatu Pusat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *value for money*, kejujuran dan pengawasan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah sedangkan akuntabilitas keuangan daerah memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian (Fitri, 2019) dengan judul pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (studi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Hasil penelitian (Yassir, 2022) dengan judul pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini yang dilakukan menemukan bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintahan Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian (Mohammad, 2021) dengan judul analisis pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money* dan pengawasan terhadap realisasi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Banjar Baru tahun 2020. Hasil penelitian ini Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara akuntabilitas keuangan daerah terhadap realisasi pengelolaan keuangan daerah, (2) tidak terdapat pengaruh yang positif dan

signifikan antara *value for money* terhadap realisasi pengelolaan keuangan daerah, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan terhadap realisasi pengelolaan keuangan daerah, (4) terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, dan pengawasan terhadap realisasi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian (Nita, 2021) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fiskal akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan fiskal pengendalian internal pemerintah memperkuat hubungan antara fiskal akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, fiskal pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan fiskal pengendalian internal pemerintah memperlemah hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini sangat penting di lakukan untuk melihat akuntabilitas keuangan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan di Kabupaten Simeulue. Variabel akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran akan di pengaruhi untuk melihat sejauh mana berpengaruh positif atau negatif terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *research gap* yang telah di paparkan di atas tentang kurang maksimalnya pengelolaan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue?
3. Apakah transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan serta menambah literatur pustaka yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pegawai melalui pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pelatihan kompetensi dan komitmen organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.